



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN/BASARNAS)**

Tahun Sidang	: 2021 – 2022
Masa Sidang	: III
Rapat	: Ke – 12
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Selasa, 25 Januari 2022
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.05 WIB s.d 15.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI dan secara Virtual Zoom Cloud Meeting dari tempat masing-masing
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2021 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Membahas Program Kerja Tahun 2022 3. Lain-lain
Ketua Rapat	: Lasarus, S.Sos.,M.Si
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: Orang dari 55 orang Anggota Komisi V DPR RI secara Fisik dan Virtual
Hadir Mitra	: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.05 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada hari ini adalah membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, Membahas Program kerja Kementerian PUPR Tahun 2022 dan Lain-lain.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri PUPR untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian PUPR dalam APBN TA 2021:
 - a. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam TA 2021 sebagai berikut:

Kementerian	Realisasi Keuangan TA 2021	Realisasi Fisik TA 2021
Kementerian PUPR	94,4%	95,4%

- b. Terhadap program/kegiatan di TA 2021 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR agar permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program/kegiatan TA 2021 dapat diselesaikan, sehingga tidak terulang lagi pada TA 2022.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk :
 - a. perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam;
 - b. peningkatan pengawasan dalam pembangunan Jalan Tol; dan
 - c. Menambah program padat karya dengan memanfaatkan sisa lelang TA 2022.
3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk segera melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air di antaranya mempercepat penyusunan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri.
4. Komisi V DPR RI mendorong Kementerian PUPR untuk mengutamakan produksi dalam negeri pada pembangunan infrastruktur.
5. Komisi V DPR RI akan mengadakan rapat gabungan dengan Komisi dan Kementerian/Lembaga terkait untuk membahas:
 - a. penanggulangan bencana alam;
 - b. pengadaan barang dan jasa.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB.

Jakarta, 25 Januari 2022

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,**



M. BASOEKI HADIMOELJONO

PIMPINAN RAPAT,



LASARUS